

DAFTAR BACAAN

Buku

- Abdurrahman, *Masalah-masalah Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1996.
- Bakri, Muhammad, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*, Yogyakarta: Citra Media, 2007.
- Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya) Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Hutagalung, Arie S., *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, LPHI, Jakarta, 2005.
- H. Muchsin dan Imam Koeswoyono, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- H.S.,Salim *Dasar– Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Koeswahyono, Imam, *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*, Artikel, 2008.
- Limbong, Bernhard, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Parlindungan, A.P., *Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria*. Mandar Maju, Bandung, 1998.

Ramelan, Eman, *Prosedur Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Airlangga university Press, Surabaya, 2014.

Salindeho, Jhon, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.

Sutedi, Adrian, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Statistik Balai Taman Nasional Kutai Tahun 2010.

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

-----, *Perolehan Hak Atas Tanah*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2011, halaman

-----, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013.

Artikel, Jurnal dan Penelitian Hukum.

Harsono, Boedi, *Masalah Kerangka Persoalan dan Pokok-pokok Kebijakan Pertanahan*, dalam BF Sihombing, *Pergeseran Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah dan Swasta*” (Studi Kasus Pengaturan Pemilikan, Penguasaan Tanah di Provinsi DKI) Jakarta: UI, 2004.

Harianto, M, *Hukum Konservasi*, dari <http://blogmharianto.blogspot.com/2010/02/hutan-konservasi.html?m=1>, diakses 31 Maret 2015.

Manurung, Yulius Alexander, *Tinjauan Yuridis Proses Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan pembangunan Untuk Kepentingan Umum Studi Kasus Jalan Tol Cinere-Jagorawi, Depok*, skripsi 2011.

Mukeri, Mahyuni, *Laporan Penelitian tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pemerintah Daerah dan Swasta Dengan Cara Ruislag Di Kalimantan Selatan*, dari mahyunish.blogspot.com diakses pada tanggal 7 Agustus 2015.

Referensi Makalah, *Tukar Guling Perspektif fikih dan hukum Positif*, dari www.referensimakalah.com/2013/02/tukar-guling-perspektif-fikih-dan-hukum.html?m=1 diakses pada tanggal 7 September 2015.

Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2007.

-----, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, Januari 2008.

Santoso, Urip , *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penguasaan Atas Tanah*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No.1, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Januari 2003.

Sumadji, *Dasar dan Ruang Lingkup Wewenang Dalam Hak Pengelolaan*, Majalah Yuridika, Vol. 21 No. 3, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Mei 2006

Wesman Endom dan Subarudi, *Metode Pendekatan Penilaian Ganti Rugi Lahan Hutan*“, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 8 Nomor 1, Bogor, 2011.

Winarsih, Sri, *Wewenang Pertanahan di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Yuridika, Vol. 23 No. 3, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, September 2008.

Yudhi Setiawan dan Boedi Djatmiko, *Pembatalan sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Alasan Cacat Yuridis Dalam aspek Wewenang*, Jurnal Era Hukum, Nomor, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara, 3 Mei 2008

Peraturan Perundang - undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN Tahun 1960 No. 104 – TLNRI No. 2043).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (LN Tahun 1990 No. 49 - TLNRI No. 3419).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan (LN Tahun 1999 No. 167).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang (LN Tahun 2004 No. 86)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (LN Tahun 2012 No. 22–TLNRI No. 5280).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (LN Tahun 2012 No. 139-TLNRI No. 5324).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LN Tahun 2013 No. 130 – TLNRI No. 5432).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2014 No. 224-TLNRI No. 5587).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan M (LN Tahun 2004 No. 29 – TLNRI No. 4374).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LN Tahun 2014 No. 92-TLNRI No. 5533).

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum (LN Tahun 2012 No.156).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.